



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA  
**SUB UNIT KERJA** : BAGIAN PEMERINTAHAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUKARNO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO**
3. NHK : **218042**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.040.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/74 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/76 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/100 m2 di SRAGEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 184.000.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, YAMAHA V-IXON SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 41.500.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	28.780.307
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.294.280.307
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.144.280.307

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.